

**PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI  
BUMDES****Benny Oktaviano<sup>1</sup>, Adi Maryadi<sup>2</sup>, Dian Sulistyorini Wulandari<sup>3</sup>, Nazwa Putri Hidayat<sup>4</sup>**<sup>1,3,4</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa<sup>2</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa[benny.oktaviano@pelitabangsa.ac.id](mailto:benny.oktaviano@pelitabangsa.ac.id)<sup>1</sup>, [adi\\_maryadi@pelitabangsa.ac.id](mailto:adi_maryadi@pelitabangsa.ac.id)<sup>2</sup>,  
[diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id](mailto:diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id)<sup>3</sup>, [putihidayatnazwa@pelitabangsa.ac.id](mailto:putihidayatnazwa@pelitabangsa.ac.id)<sup>4</sup>

---

*Diterima: 15 – 12 – 2023**Direvisi: 12 – 01 – 2023**Dipublikasikan: 15 – 01 – 2024*

---

**Abstrak**

Terdapat potensi yang dimiliki desa yang selama ini kurang dikelola oleh desadikarenakan desa belum memiliki modal untuk mengelola potensi yang ada. Hal ini menjadi salah satu sorotan dari pemerintah pusat. Maka dari itu terbitlah Undang-Undang Desa yang memberikan kesempatan desa untuk mengelola desa itu sendiri secara mandiri dan profesional. Terbetuknya usaha bisnis desa atau biasa disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDesa) diharapkan menjadi cikal bakal penggerak perekonomian ini dengan cara memaksimalkan pengembangan potensi desa yang ada. Akan tetapi timbul masalah selanjutnya yaitu Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), masih rendahnya SDM yang dimiliki BUMDes terkait pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDes. BUMDes diharapkan menjadi penggerak perekonomian di desa tersebut, menyerap sebanyak-banyak tenaga kerja untuk warga desa. Untuk itu dosen memiliki kewajiban Tridharma perguruan tinggi, salah satunya melakukan pengabdian kepada masyarakat ini mencoba memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Desa Jatibaru sebuah desa yang berada di kecamatan Cikarang Timur memiliki potensi yang besar akan tetapi belum dikelola dengan baik. Dengan memberikan lokakarya tentang laporan keuangan dan memberikan pendampingan secara terus menerus kepada desa diharapkan memiliki output pengurus BUMDes yang mumpuni dalam mengelola BUMDes terutama dibidang keuangan. Lokakarya ini memberikan materi tentang laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan yaitu SAK-ETAP.

**Kata Kunci:** potensi desa, pelaporan keuangan, pajak, SAK ETAP, BUMdes**Abstract**

*There is potential owned by the village that has not been managed by the village because the village does not have the capital to manage the existing potential. This has become one of the highlights of the central government. Therefore, the Village Law was issued, which provides an opportunity for villages to manage the village itself independently and professionally. The establishment of village business enterprises, commonly called village-owned enterprises (BUMDes/BUMDesa), is expected to be the forerunner of this economic driver by maximizing the development of existing village potential. However, the next problem arises, namely human resources (HR) problems: the low level of human resources owned by BUMDes related to BUMDes financial management and accounting. BUMDes is expected to be the driving force of the economy in the village, absorbing as much labor as possible for the villagers. For this reason, lecturers have the obligation of the Tridharma of higher education, one of which is to carry out community service, trying to provide solutions to these problems. Jatibaru Village, a village located in the East Cikarang sub-district, has great potential but has not been managed properly. By providing workshops on financial reports and providing continuous assistance to the village, it is hoped that the output of BUMDes administrators will be qualified for managing BUMDes, especially in the financial sector. This workshop provides material on financial statements that comply with financial accounting standards, namely SAK-ETAP.*

**Keywords:** village potential, financial reporting, tax, SAK ETAP, BUMDES

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, yang juga merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan lembaga komersial (commercial institution). Pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa mengingat desa harus mengelola pendanaannya sendiri karena sudah menjadi daerah yang memiliki otonomi penuh [1].

Diharapkan dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) tentunya disertai dengan pengelolaan yang baik termasuk pengelolaan pada bidang keuangan. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan menjadi salah satu prioritas dalam melihat kinerja keuangan BUMDes melalui laporan keuangan yang dihasilkannya. Dengan adanya suatu BUMDes diharapkan bisa melahirkan usaha kreatif yang mampu memberdayakan masyarakat desa sehingga memiliki tujuan akhir yakni masyarakat pedesaan yang mampu mandiri dan mengembangkan desanya sendiri [2].

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang digagas oleh pemerintah, dimana BUMDes ini diharapkan menjadi stimulus untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Sebagai suatu badan usaha maka BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat untuk mengkomunikasikan bagaimana keadaan keuangan kepada pemilik atau pihak stakeholder. Laporan keuangan yang baik dapat dijadikan alat sebagai bahan komunikasi dan evaluasi untuk going concern BUMDes kedepan. Dalam laporan keuangan tercermin struktur modal dan laba atau rugi BUMDes [3].

Penyusunan laporan keuangan pada dasarnya digunakan untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan entitas yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan serta untuk memenuhi kebutuhan pihak internal maupun pihak eksternal suatu entitas. Sementara menurut Undang - Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban BUMDes yang terdiri paling sedikit memuat perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan beserta penjelasannya, serta laporan posisi keuangan beserta perhitungan untuk laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha [4].

Sehingga diharapkan dengan adanya kinerja BUMDes melalui bentuk laporan keuangan dapat mendorong tata kelola keuangan yang transparansi, akuntabel, kooperatif, emansipatif, dan sustainable. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Sehingga BUMDes bisa diartikan organisasi yang berdiri sendiri di mana pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh suatu kepengurusan yang ada di BUMDes [2]

Oleh karena itu, pihak pengelola BUMDes harus memiliki kemampuan yang kompeten untuk mengembangkan potensi desa yang dapat memperkuat perekonomian desa. Salah satu kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes adalah kompeten dalam menyajikan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa suatu pelaksanaan operasional BUMDes, maka setiap bulan pihak BUMDes harus melaporkan laporan keuangan BUMDes beserta seluruh unit-unit usaha BUMDes. Sehingga nantinya laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang benar karena terciptanya tata kelola keuangan BUMDes yang baik. Suatu pengelolaan BUMDes harus transparan atau terbuka sehingga ada mekanisme check and balance baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat serta perlunya disusun rencana – rencana pengembangan usaha. Sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi sebagai mekanisme atau prosedur pengawasan agar setiap kegiatan dan setiap transaksi dapat dikontrol[4].

Permasalahan pada BUMDes Desa Jatibaru Berkarya yang menyebabkan operasional BUMDes terhenti untuk sementara waktu. Permasalahan tersebut terletak pada tata kelola (good governance) bidang keuangan yakni pihak BUMDes belum mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sehingga dapat berpengaruh pada kinerja keuangan BUMDes yang tidak dapat diketahui secara pasti, begitupun kegiatan operasional BUMDes tidak dapat terkontrol dengan baik. Apabila hal tersebut tidak segeraditangani maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan antar kelompok usaha dan pihak yang berkepentingan terhadap tata kelola keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan BUMDes. Permasalahan yang terjadi pada proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi dikarenakan pengurus dan anggota unit usaha BUMDes Desa Jatibaru Berkarya umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kompetensi akuntansi. Sehingga belum sepenuhnya menyadari pentingnya akuntansi dalam pelaporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pengurus BUMDes. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang menjadi gambaran kinerja BUMDes yang telah disusun selama ini tidak dapat menunjukkan kondisi yang sebenarnya sehingga kegiatan operasional BUMDes Desa Jatibaru Berkarya tidak dapat sepenuhnya terkontrol dengan baik.

Permasalahan tersebut diimbangi dengan sistem informasi akuntansi yang belum terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Dalam pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara manual sehingga memungkinkan terjadinya human error. Sementara itu proses pengarsipan dokumen baik dokumen transaksi dan dokumen lain-lain masih belum dilakukan dengan baik, sehingga sering ditemukan dokumen yang tidak terotorisasi oleh fungsi yang berwenang. Oleh karena itu, tim PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Pelita Bangsa memberikan solusi kepada pihak BUMDes Banyuanyar Berkarya dengan melakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes berdasarkan kaidah akuntansi yang berlaku.

Pada penyusunan laporan keuangan sudah tentu terdapat standar sebagai pedoman penyusunannya, di mana standar ini nantinya dijadikan dasar yang digunakan secara umum agar seluruh laporan keuangan sama dalam artian pedoman penyusunannya dan dapat dimengerti baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal selaku pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, akan ada pemaparan dari tim PKM-UPB terkait penggunaan standar akuntansi yang berlaku pada BUMDes Desa Jatibaru Berkarya. Diharapkan dengan adanya proses pelatihan dan pendampingan, pihak BUMDes Desa Jatibaru Berkarya dapat terus konsisten melaporkan keuangannya dengan baik dan benar secara mandiri, sehingga kedepannya kualitas kinerja keuangan BUMDes dapat terlihat dengan jelas dan dapat bermanfaat bagi pengurus dan anggota BUMDes, masyarakat, maupun pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendidikan masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi sesuai dengan kaidah akuntansi kepada pengurus serta anggota BUMDes Desa Jatibaru Berkarya.

Adapun langkah-langkah dari metode kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Melakukan kegiatan pra pendampingan berupa sosialisasi dan pelatihan tentang dasar akuntansi BUMDes, dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel.
2. Melakukan kegiatan pendampingan berupa pendampingan sistem informasi menggunakan Microsoft Excel serta pendampingan dan simulasi sesuai dengan kaidah akuntansi.
3. Melakukan kegiatan pasca pendampingan berupa peninjauan dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan sistem informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan kaidah akuntansi melalui wawancara secara langsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertempat di Aula Balai Desa Jatibaru dengan durasi kurang lebih 3,5 jam per hari dengan diikuti oleh para pengelola unit bisnis, pengawas BUMdes, UMKM Binaan dan perangkat Desa Jatibaru. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cermat dan penuh kehati-hatian karena tim harus memastikan bahwa materi mengenai akuntansi sederhana yang tujuannya untuk pembuatan laporan keuangan sesuai SAK ETAP dan perpajakan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh peserta, sehingga bisa diimplementasikan dengan tepat. Dalam pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap survei dan observasi, tahap perencanaan kebutuhan dan materi pelatihan, tahap pelaksanaan kegiatan.

Peserta sangat antusias dengan penjelasan dan pendampingan yang diberikan oleh tim pengabdian. Peserta mengikuti kegiatan dengan baik dan mau berusaha memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Berbagai pertanyaan diajukan oleh peserta dan ditanggapi dengan baik oleh tim pengabdian. Adapun proses pendampingan dilaksanakan secara bertahap, dengan dibantu oleh 2 mahasiswa dalam asistensi peserta.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim berhasil memenuhi tujuannya. Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan, baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan. Pemilihan waktu pelaksanaan disepakati antara mitra dan tim pengabdian, sehingga dapat menyesuaikan waktu-waktu yang tepat. Antusiasme dari para peserta atau mitra agar dapat mengelola unit secara maksimal dengan membuat laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP serta memenuhi kewajiban perpajakannya, menjadikan kegiatan ini memperoleh sambutan baik dari mitra.

Pada akhir sesi, tim pengabdian mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan evaluasi kepada mitra. Hasilnya, mitra mampu memahami materi 100% dan dapat mengimplementasikan secara mandiri. Untuk ke depannya, mitra mengharapkan ada kegiatan pengabdian serupa yang masih berkaitan dengan pengelolaan unit bisnis yang dimiliki oleh pemerintahan desa, dengan materi:

1. Akuntansi biaya
2. Akuntansi pencatatan inventaris milik desa
3. Penyusunan Laporan Konsolidasi Bumdes



Gambar 1. Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Sumber : Penulis, 2023

Harapan tersebut memberikan keleluasaan bagi tim pengabdian dari Universitas Pelita Bangsa untuk melanjutkan kembali kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada waktu yang berbeda. Materi-materi yang hendak disampaikan akan dikaji terlebih dahulu, hal tersebut berfungsi untuk menentukan alokasi waktu dan sumber daya yang mendukung. Rencana keberlanjutan kegiatan pengabdian ini ditanggapi positif oleh tim pengabdian sendiri dan mitra.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan refleksi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pemahaman mitra terhadap akuntansi sederhana serta penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pemahaman mitra tentang kewajiban perpajakan Bumdes dan unit usahanya, tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan dan konsekuensi yang muncul jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.
3. Saran bagi pihak pemerintah Kabupaten Bengkayang khususnya Pemerintah Desa, agar lebih gencar dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan akuntansi Bumdes.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Direktur DPPM Universitas Pelita Bangsa yang telah memfasilitas kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Perangkat Desa Jatibaru yang telah memfasilitasi ruang dan sarana prasarana kegiatan pengabdian. Peserta pelatihan yang telah mengikuti kegiatan pengabdian dengan antusias.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Arista, V. Ayu Satyanovi, L. Dwi Ayu Rahmawati, and A. Asri Hapsari, 'PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BUMDES BANYUANYAR BERKARYA DESA BANYUANYAR KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI', *Kumawula J. Pengabdi. Kpd.*

*Masy.*, vol. 4, no. 3, p. 550, Dec. 2021, doi: 10.24198/kumawula.v4i3.35657.

- [2] A. Okfitasari, N. T. Nugroho, and S. Rosadi, 'PENDAMPINGAN AKUNTANSI SEDERHANA DAN PERPAJAKAN BAGI POKJA (PKM PADA BUMDES DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KLATEN)', *BUDIMAS J. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 2, p. 253, Jul. 2021, doi: 10.29040/budimas.v3i2.2735.
- [3] Z. I. Ferina, S. Hanila, Y. Fitriano, N. Susanti, and A. Soleh, 'Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Bumdes Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah', *J. Pengabdi. Masy. Bumi Raflesia*, vol. 3, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.36085/jpmbr.v3i1.752.
- [4] R. G. Suci, Z. Azmi, E. Marlina, A. A. Putri, S. Rodiah, and I. P. Azhari, 'Edukasi Akuntansi Dan Peningkatan Efektifitas Pelaporan Keuangan Bumdes Berbasis Excel For Accounting (EFA)', *COMSEP J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 72–77, Apr. 2021, doi: 10.54951/comsep.v2i1.58.